



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN e-KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan mutasi pejabat dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru pada tanggal 10 Oktober 2019 maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan e_Kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Barru perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN e-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

PASAL I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 25) diadakan Perubahan sehingga ketentuan Lampiran II dalam Pasal 9 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran nilai TPP terdiri atas besaran nilai TPP Umum dan besaran nilai TPP lainnya.
- (2) Besaran nilai TPP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut, nama jabatan, kelas jabatan, dan nilai jabatan sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar hasil evaluasi jabatan dengan menggunakan metode faktor evaluasi sistem, indeks harga nilai jabatan dan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah serta Tambahan Penghasilan Lainnya.
- (4) Tambahan Penghasilan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan akumulasi honorarium yang didasarkan pada Analisis Standar Biaya dengan dasar honorarium kegiatan pada APBD atau sejak Identifikasi dan pemberian *single salary* ditetapkan dan menurut 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal (8).
- (5) Besaran nilai TPP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menurut, nama pegawai sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran nilai TPP bagi calon pegawai negeri sipil yaitu 80 % (delapan puluh persen) dari besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal II

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara yang mengalami perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai berlaku sejak Bulan Oktober
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BKPSDM	f
Kabid Pemasaran, Perikanan, Komersial dan Pengangkutan	v
Kasubid Perikanan dan Validasi Tenaga	fg
Ditetapkan tanggal:	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 28 Oktober 2019
H. **BUPATI BARRU,** *[Signature]*
[Signature]
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 28 Oktober 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

[Signature]
ABUSTAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU.

NOMOR : 35 **TAHUN 2019**
TANGGAL : 28 **OKTOBER 2019**

**BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019**

NO	NAMA	NAMA JABATAN LAMA	NAMA JABATAN BARU	JUMLAH TPP LAINNYA SETELAH DISESUAIKAN
1	2	3	6	8
DINAS PENDIDIKAN				
1	WAHIDA, S.Pd	Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan	Kasubag Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan	350.000
2	DARMIATI, SH, M.Si	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan	466.667
DINAS KESEHATAN				
3	H. MUHAMMAD SYUKRI, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sekretaris Dinas Kesehatan	1.637.050
4	ANDI PANANRANG, SKM, M.Epid	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Kesehatan	200.000
PUSKESMAS RALLA				
5	dr. Erik purnomo	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Ralla	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Ralla	391.900
PUSKESMAS PEKKAЕ				
6	dr. FARADILLAH A.SURYADI	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Pekkae	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Pekkae	391.900
7	dr. LUTFY RIJAL DAMIS	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Pekkae	391.900

NO	NAMA	NAMA JABATAN LAMA	NAMA JABATAN BARU	JUMLAH TPP LAINNYA SETELAH DISESUAIKAN
1	2	3	6	8
PUSKESMAS PADONGKO				
8	dr. A. TENRIYANI PALEWOI	Dokter Ahli Pertama	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Padongko	391.900
PUSKESMAS PALAKKA				
9	Dr Andi Suwasti	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Palakka	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Palakka	391.900
10	Dr Resky Purwasari	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Palakka	Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Palakka	391.900
PUSKESMAS BOJO BARU				
	dr. Elvira	Dokter Muda	Dokter Muda	372.400
11	dr.Dewi Apraha Apraha Asmin	dr. Ahli Pertama Puskesmas Bojo Baru	Dokter Ahli Pertama Puskesmas Bojo Baru	391.900
12	dr.Rabiatul Adawiah	dr. Ahli Pertama Puskesmas Bojo Baru	Dokter Ahli Pertama Puskesmas Bojo Baru	391.900
RUMAH SAKIT UMUM				
13	RUGAIYAH, S. Kep.Ns	Kasubag Penyusunan Program	Kasubag Keuangan Rumas Sakit Umum	1.068.100
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
14	SYAHRUDDIN, A.Md	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000
15	HJ. SYARIFAH ULFAH S,Sos	Kepala Sub Bagian Pogram dan Keuangan	Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR	303.333
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
16	Ir. NUR SALAM, M.Si.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum Dan Politik	Kepala Badan Kesbangpol	3.689.550
17	MAKHFUD, S.IP	Camat	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	750.000

NO	NAMA	NAMA JABATAN LAMA	NAMA JABATAN BARU	JUMLAH TPP LAINNYA SETELAH DISESUAIKAN
1	2	3	6	8
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
18	A. HASANUDDIN, ST.	Analisis Mitigasi Bencana	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	224.100
19	Ir. NASSER MUSA	Kepala Subbidang Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.150
DINAS SOSIAL				
20	Hj. ROSMAWATI, S. Sos	Pengelola Kepegawaian	Kasubag Umum dan SDM pada Sekretariat Dinas Sosial	161.100
21	DARMIATI A. MUHAMMAD, S.Sos	Analisis Advokasi	Kasi Bantuan Advokasi & Perlindungan Sosial pada Bidang Bantuan Sosial pada Dinas Sosial	98.100
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
22	Drs. NASARUDDIN, M.Si	Kepala Dinas	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.689.550
23	NASMA, S.Sos	Pengelola Gaji / Pengelola TPP	Pengelola Gaji / Pengelola TPP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	600.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
24	SAPARUDDIN, S.Sos, M,Si	Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi	Kabid Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	740.150
25	SASMITA	Pengelola Dokumen Perizinan	Pranata Barang dan Jasa DPMDPPKBP3A	696.000

NO	NAMA	NAMA JABATAN LAMA	NAMA JABATAN BARU	JUMLAH TPP LAINNYA SETELAH DISESUAIKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				
26	SRI NIHRAWATI,S. Sos,MM	Kasubag.Program	Kasubag.Program pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	77.650
27	ARHANUDDIN	Bendahara	Bendahara pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	550.000
28	MARJANI ZAINAL ABIDIN,SH	Kasi. Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Kasi. Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	77.650
29	MURSAL, SE	Pengelola Data Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Kasi. Tatakelola E-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	450.000
30	FITRIANA	Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	500.000
DINAS PERIKANAN				
31	ISMAWATI, SE	Kasi. Perizinan Usaha Perikanan Budidaya	Kabid. Perizinan & Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Perikanan	400.000
DINAS PERTANIAN				
32	H. HASYIM NUR, S. Sos	Kepala Sub Bagian Program	Kepala Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian	398.100
33	FITRI IRIANA, S. KOM., M. Si	Kepala Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pertanian	598.100

NO	NAMA	NAMA JABATAN LAMA	NAMA JABATAN BARU	JUMLAH TPP LAINNYA SETELAH DISESUAIKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
34	MARYAULFA, S.P., M.P.	Pengelola Program dan Kegiatan	Kepala Seksi Ketenagaan pada Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian	58.333
SEKRETARIAT DPRD				
35	Drs.Wardan	Kepala Badan Kesbangpol	Sekretaris DPRD	3.834.000
SEKRETARIAT DAERAH				
36	HJ. ANDI RACHMAWATY, SE	Kepala Dinas	Asisten Administrasi Umum	5.971.000
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				
37	REZA SYAHRIAL, S.STP	Analisis Humas dan Protokol	Pj.Kasubag Ptotokol pada Bagian Humas	1.316.667
38	LEDDY DILIYANA, S.Kom	Analisis Humas dan Protokol	Kasubag Data dan Informasi pada Bagian Humas	68.100
BAGIAN PEREKONOMIAN				
39	ADHY FATRIAH,S.STP,Msi	Kabag.Umum	Kepala Bagian Adm. Perekonomian	921.050
40	SITTI AMINAH TANG, S.Sos, M.A.P	Analisis Program Pembangunan Sub Bagian Bina Program	Kasubag. Koordinasi Penanaman Modal BUMD pada Bagian Perekonomian	247.650
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
41	M. AHMAD RIDHA, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Kesehatan, Sosial, P2KB dan P3A	Kepala Sub Bagian Kesehatan, Sosial, P2KB dan P3A	774.100
KECAMATAN BALUSU				
42	ANDI IKA SYAMSU ALAM, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Camat Balusu	1.051.050

NO	NAMA	NAMA JABATAN LAMA	NAMA JABATAN BARU	JUMLAH TPP LAINNYA SETELAH DISESUAIKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
KECAMATAN PUJANANTING				
43	TAKDIR	Penata Barang dan Jasa	Penata Barang dan Jasa	700.000
INSPEKTORAT				
44	IIS PRATIWI, SE	Pelaksana pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten	318.100
BAPPEDA				
45	RUSDI, ST	Analisis Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Subbidang Perhubungan dan Perumahan pada Bidang Infrastruktur pada Bappeda	666.667
46	BASO ARTA, ST	Kepala Subbidang Perhubungan dan Perumahan	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	940.150
47	NURMALASARI, SS	Bendahara	Kepala Subbidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Bidang Sosial Budaya dan SDM pada Bappeda	338.100
48	GUNAWAN PARENRENGI D, S.T	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Kepala Subbidang Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi pada Bappeda	100.000

NO	NAMA	NAMA JABATAN LAMA	NAMA JABATAN BARU	JUMLAH TPP LAINNYA SETELAH DISESUAIKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
49	H. JAYANTO SABIR, SE	Kasubag. Koordinasi Penanaman Modal BUMD	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Perencanaan dan Anggaran pada BPKAD	1.827.650
50	Hj. MINARNI, S.AP.	Kustodian Kekayaan Negara	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan pada Bidang Aset BPKAD	1.224.100
51	SITTI RAHMAH, S.E., M.Si.	Penyusun Laporan Keuangan	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan pada Bidang Aset BPKAD	1.853.650
52	WEDYA RATNAWATI	Pengelola Monitoring & Evaluasi	Bendahara BPKAD	750.000
	EVI TRISNAWATI, SE, M. Si	Penyusun Laporan Keuangan	Kepala Sub Bidang Akutansi Penerimaan dan Pengeliran Kas BPKAD	700.000
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
53	ABDUL RAUF, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Kasubid. Pembukuan Pelaporan pada Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Bapenda	466.666
54	ANDI ARSIDI, S.Si	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan	547.650

NO	NAMA	NAMA JABATAN LAMA	NAMA JABATAN BARU	JUMLAH TPP LAINNYA SETELAH DISESUAIKAN
1	2	3	6	8
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM				
55	SURIYANTI, S. Sos	Pengelola Gaji	Kepala Subbidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	68.100
56	HERMAN	Pengelola Program dan Kegiatan	Pengelola Gaji	221.800

H BUPATI BARRU, 

 SUARDI SALEH